

Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi

I. Daftar Informasi Publik

Berikut adalah daftar informasi publik yang wajib diumumkan oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

No.	Jenis Informasi	Deskripsi	Dasar Hukum
1	Rencana Kerja dan Anggaran Dinas	Rencana program dan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum.	UU KIP No.14/2008 Pasal 9; PP No.61/2010 Pasal 7
2	Laporan Kinerja dan Realisasi Anggaran	Laporan pelaksanaan program, capaian kinerja, dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.	UU KIP No.14/2008 Pasal 9; PP No.61/2010 Pasal 9
3	Informasi Tender dan Kontrak	Dokumen informasi terkait pengadaan barang/jasa, termasuk pengumuman tender dan pemenang kontrak.	UU KIP No.14/2008 Pasal 9; PP No.61/2010 Pasal 7 dan Pasal 8
4	Informasi Perizinan dan Non-Perizinan	Persyaratan dan prosedur perizinan serta pelayanan publik yang diselenggarakan DPU.	UU KIP No.14/2008 Pasal 9
5	Data Infrastruktur dan Proyek	Informasi tentang inventarisasi, pembangunan, dan	UU KIP No.14/2008 Pasal 9; PP No.61/2010

		perawatan infrastruktur publik.	Pasal 7
6	Pengaduan dan Layanan Pengguna	Mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjut pelayanan yang diberikan.	UU KIP No.14/2008 Pasal 9; PP No.61/2010 Pasal 9
7	Profil dan Struktur Organisasi Dinas	Informasi mengenai struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.	UU KIP No.14/2008 Pasal 9

II. Daftar Informasi yang Dikecualikan

Berikut adalah daftar informasi yang dikecualikan dan tidak wajib diumumkan kepada publik oleh Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan dalam UU KIP dan PP pelaksanaan.

No.	Jenis Informasi	Alasan Pengecualian	Dasar Hukum
1	Informasi Rahasia Pribadi	Informasi yang berkaitan dengan data dan rahasia pribadi warga negara.	UU KIP No.14/2008 Pasal 17 ayat (1)
2	Informasi yang Mengancam Keamanan Negara	Informasi yang jika dibuka dapat membahayakan keamanan nasional.	UU KIP No.14/2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a
3	Informasi Strategis Pemerintah	Informasi yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang bersifat rahasia.	PP No.61/2010 Pasal 16
4	Data Kontrak yang Bersifat Rahasia Komersial	Informasi kontrak yang dapat merugikan kepentingan negara atau pihak ketiga.	UU KIP No.14/2008 Pasal 17 ayat (1) huruf d
5	Informasi yang Mengandung Unsur Kekayaan Intelektual	Informasi yang dilindungi hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya.	UU KIP No.14/2008 Pasal 17 ayat (1) huruf e

6	Informasi yang Berkaitan dengan Proses Penegakan Hukum	Informasi yang jika dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum.	UU KIP No.14/2008 Pasal 17 ayat (1) huruf f
7	Informasi yang Dapat Merusak Hubungan Internasional	Informasi yang dapat menimbulkan kerugian hubungan diplomatik.	UU KIP No.14/2008 Pasal 17 ayat (1) huruf c